

BAB I

PENDAHULUAN

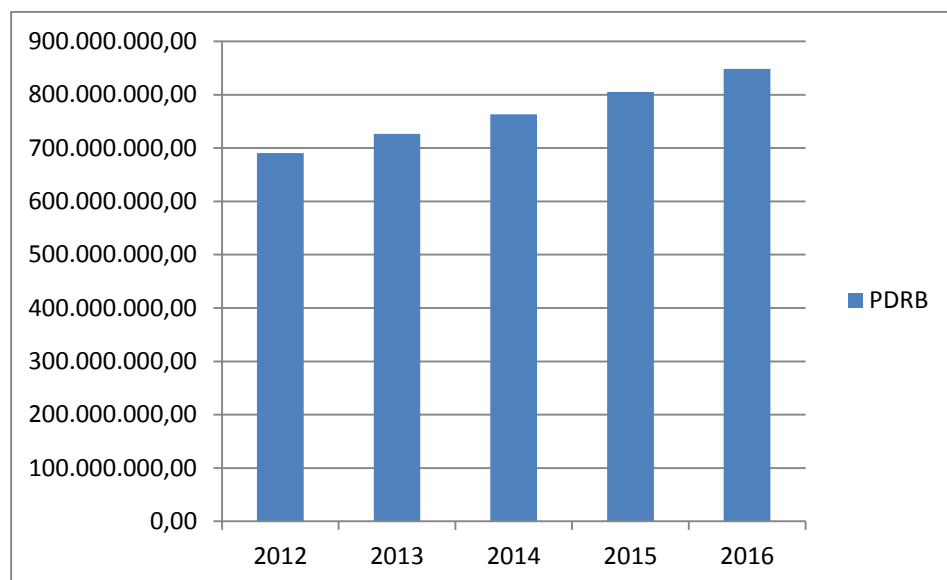
A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di suatu negara dikatakan berhasil apabila masyarakatnya bisa menikmati hidup yang sejahtera sebagai dampak positif dari kegiatan ekonomi yang tumbuh positif. Dalam mencapai tujuan tersebut maka pembangunan ekonomi suatu negara harus diperhatikan perkembangannya. Terjadinya kemajuan dalam pembangunan ekonomi salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut. (dalam Jhingan, 2012: 57) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya.

Perkembangan akan pembangunan ekonomi memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (dalam Jhingan 2010: 57) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Sedangkan menurut Tarigan (2005: 46) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadi pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di wilayah tertentu, atau dapat dikatakan kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.

Selanjutnya dalam penelitian ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Grafik 1.1
PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016
(Rupiah)



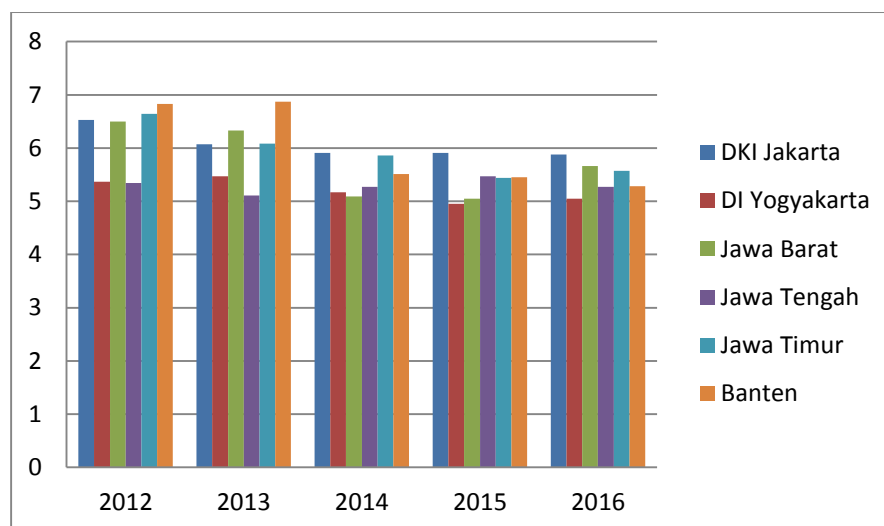
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari Grafik 1.1 diatas berisi data PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2012 sampai 2016. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki kecenderungan naik atau meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2012 yang nilainya sebesar 690,461 juta kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar 726,652 juta, kemudian terus meningkat sampai tahun 2016 sebesar 848,787 juta. Dengan terus meningkatnya PDRB tiap kabupaten/kota berarti terjadi peningkatan aktivitas perekonomian di setiap wilayah.

John Maynard Keynes (dalam Tarigan, 2005 : 48) berpendapat bahwa pemerintah memiliki fungsi sebagai pengatur kegiatan perekonomian dalam rangka menjaga tingkat pertumbuhan yang efisien.

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak lepas dari usaha keras bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun masih harus memperhatikan Pertumbuhan ekonomi, bisa kita lihat pada Grafik 1.2 berikut:

Grafik 1.2
PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012-2016 (persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2016

Dari Grafik 1.2 di atas berisi data PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2012 sampai 2016. PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan selama tahun 2012 sampai 2016. Provinsi DKI Jakarta

menduduki peringkat pertama di Pulau Jawa. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-5 setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Disini muncul permasalahan yaitu tingkat PDRB Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal dari Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Padahal dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu di atas 25% dari Pulau Jawa dan total penduduknya mencapai 34.19 juta jiwa pada tahun 2016 (BPS Jawa Tengah 2016) maka dari itu perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Pesatnya pertumbuhan industri di pasar global maupun pasar domestik berdampak pada meningkatnya persaingan diantara industri-industri tersebut. Berbagai risiko, baik risiko yang rendah maupun risiko yang tinggi juga harus dihadapi oleh perusahaan, kondisi inilah yang memicu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Julianto,Suparno, 2016).

Industri di Jawa Tengah merupakan salah satu komponen perekonomian yang penting. Industri memungkinkan perekonomian berkembang pesat dan semakin baik, sehingga membawa perubahan dalam struktur perekonomian daerah.

Banyak industri-industri yang mulai bermunculan di Provinsi Jawa Tengah terutama industri-industri besar dan sedang yang siap memproduksi untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar di daerah Jawa Tengah. Untuk mengetahui jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Industri Besar Sedang dan Kecil Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Industri Besar Sedang	Pertumbuhan	Jumlah Industri Kecil	Pertumbuhan
2012	3310	18,22%	80.583	16,73%
2013	3503	19,28%	80.339	16,68%
2014	3515	19,35%	99.681	20,70%
2015	3754	20,66%	105.140	21,83%
2016	4084	22,48%	115.751	24,03%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah industri besar dan sedang dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan walau tidak banyak. Di tahun 2012 jumlah industri sebesar 3,310 atau 18,22% dan di tahun 2016 jumlah industri sebesar 4,084 atau setara 22,48% dan industri kecil mengalami peningkatan, di tahun 2012 jumlah industri kecil sebesar 80.583 atau 16,73% dan di tahun 2016 jumlah industri kecil sebesar 115.751 atau sebesar 24,03%. Pertumbuhan industri besar sedang dengan industri kecil masih kalah, kebijakan pemerintah harus mempermudah investor yang ingin menanamkan modal agar pertumbuhan industri besar sedang bisa meningkat dengan cepat setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah industri besar dan sedang makan produksi barang akan bertambah perekonomian akan semakin berkembang pesat dan semakin baik.

Faktor lain yang mempengaruhi PDRB adalah tingkat pendidikan. Sektor Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus di penuhi, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah

negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Menurut Sukirno (2004) pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi . Sementara itu , upaya dalam mengukur kualitas melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara melihat Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. RLS ini melihat rata-rata usia lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif, yaitu berusia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS di suatu daerah maka akan semakin baik kualitas SDM yang dimilikinya.

Tabel 1.2
Rata-rata Usia Lama Sekolah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012-2016

Tahun	Rata-rata Lama Usia Sekolah
2012	6.77
2013	6.80
2014	6.93
2015	7.03
2016	7.15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat RLS di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 RLS penduduk mencapai 6.77 tahun yang setara dengan lulus jenjang SD. Pada tahun 2016 RLS penduduk mencapai 7.15 tahun yang setara dengan tingkat SMP kelas 7. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jawa Tengah menamatkan pendidikan di jenjang SD. Sementara itu,

Badan Program Pembangunan PBB menetapkan batas minimum untuk RLS suatu daerah adalah 15 tahun atau setara dengan jenjang diploma / universitas. Maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk mendapat gaji atau upah. Berdasarkan teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap, Sukirno (dalam Sulistiawati, 2012: 200)

Pemerintah menetapkan upah berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data UMK berdasarkan KHL.

Tabel 1.3
Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016

Tahun	KHL	UMK
2012	864,330	837,855
2013	963,276	918,970
2014	1,108,706	1,082,369
2015	1,218,938	1,214,005
2016	1,412,988	1,417,864

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2016

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun UMK masih di bawah KHL.

Adapun masing masing-kota memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda beda. Ketentuan kenaikan rata-rata UMK tersebut tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan di Kota masing-masing. Karena KHL adalah acuan untuk menetapkan standar upah minimum suatu daerah. Pertumbuhan PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi juga tidak lepas dari peran belanja pemerintah. Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat ekonomi suatu daerah (Wibisono : 2005). (Sodik,Jamzani, 2007), menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis
Belanja tahun 2012-2016 (dalam rupiah)

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Pertumbuhan
2012	8.858.046.481.726	2.588.797,623,408	11.446 .844.105.134	14,98%
2013	9.586.844.209.119	3.137.932,099,315	12.724.776.308.434	16,64%
2014	11.117.699.785.604	3.968.365,248,818	15.086. 065.034.422	19,74%
2015	12.690.256.149.029	5.130.504,346,313	17.820.760.495.342	23,31%
2016	14.045.265.019.369	5.309.109,806,614	19.354.374.825.983	25,32%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa selama 2012-2016 pengeluaran yang dilakukan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah mengalami cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 pengeluaran pemerintah sebesar 11.446 triliyun rupiah atau setara 14,98%. Pada tahun 2016 sebesar 19.354 triliyun rupiah atau setara 25,32%. Proporsi maupun perkembangan realisasi belanja langsung yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk kepentingan konsumtif. Keadaan ini menyebabkan realisasi belanja daerah yang besar belum mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Bertambahnya jumlah industri diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan suatu wilayah, Berdasarkan data dan uraian di atas mengenai pengaruh jumlah industri, tingkat pendidikan, tingkat upah dan belanja pemerintah terhadap laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi tersebut, dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH JUMLAH INDUSTRI, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT UPAH, BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Suatu aktivitas perekonomian akan menghasilkan perkembangan perekonomian yang tentunya akan berdampak pada wilayah dimana aktivitas

perekonomian itu berlangsung. Perkembangan sektor industri yang semakin maju dan semakin bertambahnya jumlah industri yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal yaitu produksi akan barang lebih cepat dan membawa kontribusi besar terhadap PDRB.

Selanjutnya dalam penelitian ini fenomena mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat di jelaskan karena terjadinya beberapa hal. Pertama adalah bertambahnya jumlah industri meningkatkan kegiatan perindustrian dan memberikan sumbangsih terhadap PDRB di Jawa Tengah. Kemudian sektor pendidikan juga mempunyai peran dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penetapan upah minimum yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika masyarakat sejahtera maka produksi barang akan meningkat. Belanja pemerintah yang proporsional akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh jumlah industri terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

4. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh jumlah industri, tingkat pendidikan, tingkat upah, belanja pemerintah secara bersama terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber masukan yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai tambahan referensi atau wawasan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terutama mengenai industri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data panel, dimana merupakan gabungan data silang (cross section) dengan data deret waktu (time series). Data yang diambil adalah data dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan rentang tahun 2012-2016.

2. Alat analisis

Analisis Regresi Data Panel

Analisis dengan menggunakan data panel adalah kombinasi antara time series data dan cross section data (Gujarati, 2010). Dan data yang digunakan sebanyak 35 data yang mewakili Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Laju Pertumbuhan PDRB

i = Kabupaten/Kota (1,...,35)

t = Waktu (tahun 2012-2016)

β_0 = Konstanta

X1 =Jumlah Industri

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Tingkat Upah

X4 = Belanja Pemerintah

ε = Variabel Pengganggu

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi.

Duplikasi Model : (Nachrowi dan Usman, 2006).

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan : meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka : berisi tentang penjelasan dan landasan teori yang relevan dalam penelitian ini.
3. BAB III Metode Penelitian : berisi tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data, jenis data, sumber data.
4. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan : Menguraikan tentang hasil pengolahan data dan pembahasan tentang data yang telah di olah.
5. BAB V Penutup : Meliputi kesimpulan dari pembahasan tentang skripsi yang telah disusun atau dibuat.